



## Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Badan Permasyarakatan Desa (SIM BPD) dalam Penyampaian Informasi dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung

I Made Yudi Dwipayana\*, I Made Yudhiantara, Toto Noerasto

Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana, Universitas Warmadewa

\*Email: [madeyudi305@gmail.com](mailto:madeyudi305@gmail.com)

**How to Cite:** Dwipayana, I, M, Y., Yudhiantara, I, M., Noerasto, T. (2023). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Badan Permasyarakatan Desa (SIM BPD) dalam Penyampaian Informasi dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 8(2); 90-95. DOI: <https://doi.org/10.22225/pi.8.2.2023.90-95>

### Abstract

Villages as the lowest government entity have implemented an information technology-based village concept known as Smart Village. Punggul Village, Abiansemal District, Badung Regency is one of the villages that actively uses technology systems in all government activities and community service activities. One of the application innovations owned by Punggul Village is the BPD SIM application. This research seeks to analyze the implementation of the BPD SIM application. The aim of the research is to analyze and describe the implementation of the BPD SIM application in Punggul Village and determine the factors inhibiting the implementation of the BPD SIM in Punggul Village. The research approach uses a qualitative descriptive method with the application of Edward III's theory. Data collection was carried out using observation techniques, in-depth interviews and documentation. The selection of informants used purposive sampling techniques, and qualitative data analysis was inductive. The research results show that the implementation of the BPD SIM application in Punggul Village has not been effective based on the perspective of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Factors inhibiting implementation are socialization that has not run optimally, inadequate resources, not having the same understanding between BPD officials, and a lack of clear division of tasks in implementing this application.

**Keynotes:** application SIM BPD; implementation

### Abstrak

Desa sebagai entitas pemerintahan terendah telah menerapkan konsep desa berbasis teknologi informasi yang dikenal dengan Smart Village. Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung merupakan salah satu desa yang aktif menggunakan sistem teknologi dalam segala kegiatan pemerintahan dan kegiatan pelayanan masyarakat. Salah satu inovasi aplikasi yang dimiliki Desa Punggul adalah aplikasi SIM BPD. Penelitian ini berupaya menganalisis penerapan aplikasi SIM BPD. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi aplikasi SIM BPD di Desa Punggul dan mengetahui faktor penghambat pelaksanaan SIM BPD di Desa Punggul. Pendekatan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penerapan teori Edward III. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara yang mendalam dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, dan analisis data kualitatif bersifat induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SIM BPD di Desa Punggul belum berjalan dengan efektif berdasarkan perspektif komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor penghambat implementasi yaitu sosialisasi yang belum berjalan dengan optimal, sumber daya yang belum memadai, belum memiliki pemahaman yang sama antar aparatur BPD, dan kurang adanya pembagian tugas yang jelas dalam penerapan aplikasi ini.

**Kata Kunci:** aplikasi SIM BPD; implementasi

## 1. Pendahuluan

Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, melakukan kegiatan tertentu atau mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/04/M.PAN/4/2007 Tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik Di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah yang selanjutnya disebut Permenpan 2007.

E-governmance adalah sebuah bentuk media komunikasi, dimana definisi dari media menurut Marshall McLuhan dalam bukunya "Understanding Media", menyatakan bahwa media itu "The Extension of Man" (media itu perluasan manusia) (Marshall, 1964). Media dengan jangkauan yang dimilikinya akan meluaskan banyak hal pada diri manusia, menerobos ruang dan waktu (Nurina Aprilia, Fefta Wijaya, & Suryadi, 2014). Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government berisi tentang instruksi penggunaan e-government di lingkungan pemerintahan. Kebijakan ini sekaligus mengharuskan instansi-instansi pemerintahan membangun dan menggunakan teknologi informasi sebagai penunjang kinerja pemerintahan serta meningkatkan pelayanan publik. Konsep E-Government merupakan salah satu contoh implementasi praktek e-business dalam bidang pemerintahan (Ayu Sinta Dewi & Mudjahidin, 2013) sehingga penerapan e-government di lingkungan Pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi wahana untuk mempercepat pertukaran informasi, menyediakan sarana layanan dan kegiatan transaksi dengan warga masyarakat seperti menciptakan sebuah aplikasi yang bisa digunakan oleh masyarakat luas.

Perkembangan teknologi informasi dalam konteks pemerintahan di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Inpres tersebut menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-Gov) akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menjadi pintu gerbang penerapan *electronic government* dan menjadi manifestasi akan komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan berbasis kepada pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi (Dengen & Hatta, 2009; Hasibuan, 2007; Yunita & Aprianto, 2018). Sejak lahirnya Inpres Nomor 3 Tahun 2003, terjadi peningkatan signifikan terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Teknologi informasi tidak hanya digunakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, tetapi juga dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat berbasis elektronik (Fahlefi, 2014; Holle, 2011; Nugraha, 2018) yang diterapkan mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah (Pratama, Hakim, & Shobaruddin, 2015).

Di lain pihak, setelah dikeluarkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2003, perkembangan pemerintahan digital di Indonesia dinilai masih belum sesuai dengan harapan. Untuk mengantisipasinya, kemudian dikeluarkanlah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pasal 1 dalam peraturan presiden ini menyebutkan yang dimaksud dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE yang merupakan tahap baru bagi pengelolaan atau manajemen pemerintahan di Dunia. Berdasarkan strategi tersebut, semua instansi pemerintah wajib melaksanakan SPBE atau yang disebut dengan istilah *e-government*.

Pesatnya penggunaan teknologi informasi dalam seluruh aspek kehidupan mulai dari lingkungan pemerintah sampai dengan masyarakat telah mendorong beberapa kabupaten/kota di Indonesia untuk menerapkan keterhubungan pemanfaatan teknologi informasi yang

ada berupa integrasi elemen-elemen kota untuk mendukung kesinambungan kehidupan perkotaan berbasis teknologi informasi atau bisa disebut dengan *smart city* (Essabela, 2016; Meijer, 2015). Tujuan dari pengembangan *smart city* selain untuk mengintegrasikan seluruh elemen kota dalam sebuah sistem teknologi informasi yang mudah diakses oleh semua orang, juga untuk penyediaan pelayanan publik yang transparan, efisien dan adil bagi semua masyarakat (Sudarto, 2006; Utomo & Hariadi, 2016).

Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung merupakan salah satu desa yang dikenal aktif menggunakan sistem teknologi dalam segala kegiatan pemerintahan dan kegiatan pelayanan masyarakat. Sejak tahun 2014 Desa Punggul selalu menciptakan inovasi-inovasi pelayanan publik dengan memanfaatkan sistem digital yang berkembang di masa ini. Bentuk inovasi berbasis digital yang dikembangkan Desa Punggul dimanifestasikan dalam beberapa hal, yaitu: 1) pengadaan infrastruktur penunjang aktivitas masyarakat; 2) pembangunan beragam sistem informasi dan aplikasi berbasis web sistem maupun mobile; dan 3) peluncuran program pemberdayaan masyarakat. Berkat inovasi-inovasi tersebut, pada tahun 2019, Desa Punggul mendapatkan predikat sebagai “Desa Digital” sekaligus menjadi role model pertama Desa Digital se-Kabupaten Badung.

Salah satu inovasi aplikasi yang dimiliki Desa Punggul adalah aplikasi SIM BPD. SIM BPD adalah aplikasi mobile berbasis Android yang dihadirkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Punggul sebagai wujud nyata dalam pemanfaatan perkembangan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Aplikasi ini dibuat berawal dari keluhan masyarakat yang tidak memiliki wadah untuk menyampaikan aspirasi secara langsung, dimanapun dan kapanpun. Dengan adanya aplikasi SIM BPD Punggul diharapkan masyarakat Desa Punggul dapat menyampaikan aspirasi maupun melaporkan berbagai kejadian yang ada di lingkungan desa dengan mudah, cepat & transparan. Aplikasi ini juga mempermudah kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan dan penyampaian informasi atau aspirasi ke pemerintahan Desa berdasarkan hasil laporan warga. Aplikasi SIM BPD ini dirancang pada tahun 2019 dan sampai saat ini masih dalam tahap pengembangan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan di Desa Punggul.

## 2. Metode

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian bukan berupa angka – angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empiric dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif Lexy J. Moleong (2010 : 6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dengan cara- cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penggunaan metode penelitian kualitatif ini membantu peneliti dalam mengumpulkan berbagai informasi yang terkait dengan pelayanan publik berbasis SIM BPD di Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.

Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling sebagaimana menurut Sugiyono (2022:95) purposive sampling merupakan teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu, berdasarkan kapasitas dan pengetahuan terkait masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan teknik interaktif dari miles huberman dan saldana (2014).

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Implementasi Aplikasi SIM BPD di Desa Punggul dikaji dan dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edward (Edward III) yang mencakup unsur komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil riset di lapangan maka dapat dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut :

#### **Komunikasi**

Implementasi aplikasi SIM BPD (Sistem Informasi Manajemen Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Punggul dilihat dari perspektif komunikasi maka terlihat belum berjalan dengan baik karena sosialisasi dan pelatihan terkait cara penggunaan aplikasi SIM BPD yang dilakukan oleh pihak BPD belum maksimal dirasakan oleh masyarakat Desa Punggul. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat Desa Punggul yang tidak paham bahkan tidak tau akan adanya dan bagaimana cara penggunaan aplikasi SIM BPD tersebut.

#### **Sumber Daya**

Implementasi aplikasi SIM BPD (Sistem Informasi Manajemen Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Punggul dilihat dari perspektif sumber daya khususnya sumber daya manusia yang merupakan sumber daya yang paling penting diantara sumber daya lainnya, didapatkan informasi bahwa SDM yang dimiliki Desa Punggul khususnya dalam menangani Aplikasi SIM BPD belum memadai. Karena dalam mensosialisasikan aplikasi ini tidak cukup hanya dengan berbicara tetapi harus memberikan praktek langsung. Hal tersebut dikarenakan sasaran dari pengguna aplikasi ini adalah seluruh masyarakat Desa Punggul yang dimana sudah pasti tidak semuanya melek akan teknologi. Pendataan dan pelatihan langsung ke rumah-rumah warga terkait penggunaan aplikasi SIM BPD tersebut yang seharusnya bisa dilakukan secara bertahap tetapi tidak dilakukan. Begitupula terkait sumber daya lainnya seperti jaringan wifi di rumah-rumah warga yang seharusnya bisa diwujudkan oleh pemerintahan desa, apalagi Desa Punggul sudah disebut sebagai Desa Digital yang sudah pasti kedepannya program-program Desa pasti bersifat digital dan masyarakat akan selalu menggunakan internet.

#### **Disposisi**

Implementasi aplikasi SIM BPD (Sistem Informasi Manajemen Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Punggul dilihat dari perspektif disposisi menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan khususnya yang manaungi Aplikasi SIM BPD ini belum memiliki pemahaman yang sama terkait penerapan aplikasi SIM BPD dan masih kurangnya konsistensi dari desa yang berpengaruh terhadap komitmen dalam mengimplementasikan aplikasi SIM BPD. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan ke rumah-rumah masyarakat juga menyebabkan konsistensi dari aparatur Desa menjadi kurang untuk masyarakat.

#### **Struktur Birokrasi**

Implementasi aplikasi SIM BPD (Sistem Informasi Manajemen Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Punggul dilihat dari perspektif struktur birokrasi dapat dinyatakan belum adanya pembagian tugas yang jelas dalam implementasi aplikasi SIM BPD ini. Hanya ada pembagian tugas kepada sekretaris. Yang dimana seharusnya tugas tersebut bisa dibagi kepada tim dari BPD untuk terus melakukan pendataan atau pengecekan terkait penggunaan aplikasi SIM BPD. Maka sesuai uraian diatas, aspek struktur birokrasi belum memadai dalam mendukung implementasi aplikasi SIM BPD tersebut.

Sesuai dengan hasil penelitian terhadap empat dimensi di atas maka implementasi aplikasi SIM BPD (Sistem Informasi Manajemen Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Punggul belum berjalan secara efektif. Sesuai dengan teori Edward III, tampak bahwa 4 faktor di dalam teori tersebut belum berjalan dengan baik, meliputi: faktor komunikasi atau sosialisasi yang belum berjalan dengan baik, kekurangan sumber daya terkait dalam

mensosialisasikan aplikasi SIM BPD dan sumber daya lainnya seperti sarana dan prasarana, sikap pelaksana (disposisi) yang belum memiliki komitmen karena kurang memiliki pemahaman yang sama terkait penerapan aplikasi SIM BPD, dan dari struktur birokrasi belum ada pembagian tugas yang jelas dalam penerapan aplikasi SIM BPD.

Faktor-faktor penghambat implementasi aplikasi SIM BPD (Sistem Informasi Manajemen Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Punggul sesuai dengan teori dari Edward III adalah Komunikasi (sosialisasi) yang kurang optimal kepada masyarakat, Sumber Daya Manusia yang kurang dan sumber daya sarana prasarana seperti jaringan free wifi yang belum sampai di rumah-rumah warga kemudian penggunaan aplikasi yang hanya bisa digunakan oleh pengguna Android dan tidak adanya fitur komen dalam aplikasi, kemudian belum adanya pemahaman yang sama antar aparatur BPD, dan tidak adanya pembagian tugas yang jelas antar aparatur BPD dalam penerapan aplikasi SIM BPD dan yang menjadi faktor penghambat implementasi aplikasi SIM BPD (Sistem Informasi Manajemen Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Punggul sesuai dengan teori dari Edward III adalah Komunikasi (sosialisasi) yang kurang optimal kepada masyarakat, Sumber Daya Manusia yang kurang dan sumber daya sarana prasarana seperti jaringan free wifi yang belum sampai di rumah-rumah warga kemudian penggunaan aplikasi yang hanya bisa digunakan oleh pengguna Android dan tidak adanya fitur komen dalam aplikasi, kemudian belum adanya pemahaman yang sama antar aparatur BPD, dan tidak adanya pembagian tugas yang jelas antar aparatur BPD dalam penerapan aplikasi SIM BPD.

#### 4. Simpulan

Implementasi Aplikasi SIM BPD (Sistem Informasi Manajemen Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Punggul belum berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari empat faktor yaitu komunikasi kepada masyarakat yang masih belum maksimal, sumber daya yang belum memadai baik secara kualitas dan kuantitas, disposisi yang belum berjalan secara efektif dan tidak adanya struktur birokrasi yang khusus mengurus penerapan aplikasi SIM BPD yang menyebabkan tidak adanya pembagian tugas yang jelas dalam penerapan aplikasi SIM BPD. Faktor – faktor yang menghambat implementasi aplikasi SIM BPD (Sistem Informasi Manajemen Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Punggul yaitu dari faktor komunikasi (sosialisasi) kepada masyarakat yang belum maksimal sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang tidak paham akan kegunaan dari aplikasi SIM BPD, kemudian dari faktor sumber daya manusia yang kurang memadai dan kurangnya sumber daya sarana prasarana seperti aplikasi yang baru hanya bisa digunakan oleh pengguna Android kemudian tidak adanya fitur komentar dalam aplikasi, dan yang terakhir dari faktor disposisi belum adanya pemahaman yang sama antar aparatur BPD

#### Daftar Pustaka

- Buchari, A, 2016, Jurnal Ilmiah “Sosiohumaniora” FISIP Universitas Padjadjaran Volume 18 Nomor 3, Nopember 2016: 235 – 239 *Implementasi E-Service Pada Organisasi Publik Di Bidang Pelayanan Publik Di Kelurahan Cibangkong Kecamatan Batununggal Kota Bandung*.
- Dunn, William N..2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : PT Hanindita Graha Widya
- Echols, John M. and Hassan Shadily. 2000. *Kamus Inggris – Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Edward III, George C. 1980. *Implementasi Publik Policy*. Washington D.C : Congressional Quarterly Inc.
- <http://punggul.desa.id>
- Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Lababa, D. 2008. *Evaluasi Program*. Manado : Sebuah Pengantar

- Moenir, A.S. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Natasurya, R. 2014. yang melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Kebijakan E-Government Melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur”.
- Noveriyanto, B. 2018. e-government sebagai layanan komunikasi pemerintah kota surabaya (Studi Kematangan e-government Sebagai Layanan Komunikasi Government to Government, Government to Citizen, Government to Business)
- Siswanto, S. 2003. *Globalisasi dan Teknologi Informasi*. Makalah Seminar Teknologi . UGM
- Sugiyono, S. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sunggono, B. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Karya Unipress
- Syaukani. 2004. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Pustaka pelajar
- Tangkilisan, T., Hessel, N. S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Lukman Offset hal. 21 dan 22
- Tjiptono, F. 2000. *Manajemen Jasa*, Edisi Kedua. Yogyakarta : Andy Offset
- Usman, N. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : Grasindo hal.70
- Winarno, B. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo
- Yunanda, M. 2009. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Balai Pustaka
- Timang, Y. 2018. yang melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Poasia Kota Kendari”.
- Ramdhani, A. 2017. Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik Program Studi Administrasi Publik, Universitas Garut
- Supriadi, A. 2012. yang melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Serang*” Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang.
- Timang, Y. 2018. “*Penerapan Sistem Informasi Manajemen Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Poasia Kota Kendari*” : Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Halu Oleo Kendari.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik